

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI

Buletin APBN

Vol. VI, Edisi 3, Maret 2021

**Tantangan Sarana Prasarana
Perpustakaan dalam
Meningkatkan Literasi**

p. 3

**Dilema Defisit APBN Serta Solusi
Mengatasinya**

p. 8

**Pembangunan Infrastruktur
Pelayanan Dasar: Antara
Kebijakan *Refocusing* Anggaran
dan Prioritas Nasional**

p. 12

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Dwi Resti Pratiwi
Ratna Christianingrum

Ade Nurul Aida
Ervita Luluk Zahara

Editor

Marihot Nasution
Riza Aditya Syafri
Satrio Arga Effendi

Tantangan Sarana Prasarana Perpustakaan Dalam Meningkatkan Literasi

p.3

PEMERINTAH berkomitmen untuk menyelesaikan isu rendahnya budaya literasi di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menetapkan target peningkatan indeks budaya literasi pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Namun, masih terdapat hambatan dalam mencapai target tersebut dari aspek sarana dan prasarana perpustakaan. Selain itu terdapat ketidakselarasan antara target indikator peningkatan literasi dan capaiannya saat ini, serta minimnya dukungan anggaran.

p.8

Dilema Defisit APBN Serta Solusi Mengatasinya

PANDEMI Covid-19 memaksa terjadinya peningkatan defisit yang signifikan. Kebijakan defisit APBN kondisi normal terbukti tidak lagi efektif berdampak pada perekonomian Indonesia. Namun, kebijakan defisit APBN pada kondisi krisis merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Terlebih lagi pemerintah diberikan ruang untuk melakukan pelebaran defisit melebihi 3 persen hingga tahun 2022. Meskipun begitu, pemerintah tidak boleh terlena karena fakta menunjukkan bahwa setiap kebijakan defisit APBN selalu menimbulkan penambahan utang. Diperlukan upaya dalam rangka mengurangi defisit sehingga pada pasca krisis APBN bisa terselamatkan untuk pembangunan ekonomi bukan untuk membayar utang.

Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar: Antara Kebijakan Refocusing Anggaran dan Prioritas Nasional

p.12

INFRASTRUKTUR diyakini memiliki peranan positif bagi pertumbuhan ekonomi serta menjadi kunci penting dalam transformasi ekonomi nasional. Pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dari tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Namun di tengah pandemi dan upaya pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur secara umum harus mengalami penyesuaian dan refocusing anggaran. Meskipun demikian, infrastruktur pelayanan dasar masih ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 karena memiliki daya dukung bagi pemulihan ekonomi nasional melalui Program Padat Karya Tunai (PKT).

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Tantangan Sarana Prasarana Perpustakaan dalam Peningkatan Literasi

oleh
Savitri Wulandari*)

Abstrak

Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan isu rendahnya budaya literasi di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menetapkan target peningkatan indeks budaya literasi pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Namun, masih terdapat hambatan dalam mencapai target tersebut dari aspek sarana dan prasarana perpustakaan. Selain itu terdapat ketidakselarasan antara target indikator peningkatan literasi dan capaiannya saat ini, serta minimnya dukungan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, adapun rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan, meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap rencana, maupun realisasi kegiatan pemerintah, serta lebih proaktif dalam melaksanakan kerjasama dan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat.

Tingkat literasi Indonesia masih sangat rendah. Hasil studi *Programme for International Student Assessment (PISA) 2018* yang dirilis oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca meraih skor rata-rata yakni 371. Skor tersebut merupakan skor yang sama dengan yang diraih oleh Indonesia pada tahun pertamanya berpartisipasi dalam PISA pada tahun 2001 yang juga merupakan skor terendah selama ini. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memahami dan keterampilan menggunakan bahan-bahan bacaan, khususnya teks dokumen, pada anak-anak Indonesia usia 9 – 14 tahun berada di peringkat enam terbawah dari 79 negara.

Hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI)/*Indonesia National Assessment Programme (INAP)* yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains bagi anak sekolah dasar juga menunjukkan hasil serupa. Secara nasional, 46,83 persen anak berada dalam kategori kurang dalam membaca. Sementara survei *Central Connecticut State*

University yang mengurutkan tingkat literasi berbagai negara, memosisikan Indonesia di urutan 60 dari 61 negara yang disurvei (Kemendikbud, 2019).

Dalam menanggapi isu tersebut, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan budaya literasi dan menuangkannya dalam RKP tahun 2021. Beberapa indikator yang dijadikan acuan dalam peningkatan budaya literasi merupakan indikator terkait sarana dan prasarana perpustakaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan hulu terkait sarana prasarana perpustakaan baik dari akses pada perpustakaan itu sendiri, maupun koleksi bahan bacaan perpustakaan. Tulisan ini akan mengurai beberapa tantangan dalam meningkatkan budaya literasi dari aspek sarana prasarana perpustakaan.

Tantangan Sarana Prasarana Perpustakaan

Terdapat beberapa tantangan pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan budaya literasi di Indonesia, antara lain:

*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: savitri.wulandari@dpr.go.id

Pertama, ketersediaan perpustakaan yang belum memadai dan tidak merata. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, perpustakaan merupakan institusi layanan publik yang wajib memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang (UU) No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan.

Kewajiban pemerintah atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat diperjelas pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air. Selaras dengan amanat tersebut, Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib pada semua level pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan daerah.

Data yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2019 menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan perpustakaan secara nasional baru terpenuhi 20 persen, yakni baru 154.359 perpustakaan dari rasio kebutuhan sebesar 767.952 perpustakaan. Adapun perpustakaan umum, yakni perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dari tingkat pusat, daerah, kecamatan, sampai desa, serta perpustakaan komunitas dan taman bacaan baru mencapai ketersediaan 26 persen dari rasio yang dibutuhkan. Perbandingan ketersediaan perpustakaan dibandingkan dengan kebutuhan perpustakaan dapat dilihat pada tabel 1.

Data pada tabel 1 memperlihatkan bahwa disparitas ketersediaan perpustakaan dibandingkan jumlah kebutuhan perpustakaan masih sangat tinggi, utamanya ketersediaan

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Perpustakaan

Jenis Perpustakaan	Ketersediaan	Kebutuhan	Persentase Ketersediaan
Perpustakaan Nasional	1	1	100
Perpustakaan Umum	23.611	91.191	26
PU Provinsi	33	34	97
PU Kabupaten/Kota	467	515	91
PU Kecamatan	600	7.094	8
PU Desa/Kelurahan	21.467	82.505	26
Perpustakaan Komunitas	693	693	100
Taman Bacaan	351	351	100
Perpustakaan Khusus	7.132	384.633	2
Perpustakaan Sekolah	121.187	287.631	42
SD/MI	100.000	174.179	57
SMP/MTs	12.000	56.620	21
SMA/SMK/MA	6.599	35.581	19
Pondok Pesantren	2.588	21.251	12
Perpustakaan Pendidikan Tinggi	2.428	4.496	54
Jumlah	154.359	767.952	20

Sumber: LAKIP 2016, Perpusnas RI dalam Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud, 2019, diolah.

perpustakaan khusus (baru tersedia 2 persen), perpustakaan umum kecamatan (baru tersedia 8 persen), dan pondok pesantren (hanya tersedia 12 persen). Meskipun ketersediaan perpustakaan umum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (perpustakaan daerah dan perpustakaan kabupaten/kota) telah mencapai lebih dari 90 persen, namun hal itu belum menjamin kebutuhan bacaan masyarakat di pelosok, mengingat lokasi perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota umumnya terletak di pusat kota (Puslitjakdikbud Balitbang, Kemendikbud, 2019).

Kedua, terbatasnya ketersediaan bahan bacaan. Salah satu komponen penting perpustakaan adalah ketersediaan koleksi bahan perpustakaan. Tanpa adanya koleksi bahan perpustakaan secara memadai dalam hal jumlah dan kualitas, perpustakaan tidak akan mampu memberikan layanan yang baik bagi penggunaannya.

Rasio ideal ketersediaan jumlah koleksi bahan perpustakaan terhadap populasi menurut IFLA/UNESCO adalah 2:1 atau dua koleksi untuk satu penduduk (Perpusnas, 2018). Menggunakan penghitungan rasio ini, dengan jumlah penduduk sebanyak 268.074.457 jiwa

dan koleksi perpustakaan umum daerah sebanyak 22.318.083 eksemplar, nampak bahwa jumlah koleksi yang saat ini tersedia masih sangatlah jauh dari kondisi ideal. Jumlah koleksi di perpustakaan umum saat ini hanya sebesar 4,16 persen dari jumlah koleksi ideal yang berarti perpustakaan Indonesia kekurangan koleksi sebesar 513.830.831 eksemplar. Kekurangan koleksi yang sangat besar pada perpustakaan umum adalah masalah serius, karena keterbatasan akses pada sumber ilmu pengetahuan, dapat berdampak buruk pada perkembangan tingkat literasi pada hampir seluruh wilayah Indonesia.

Ketiga, ketersediaan pustakawan belum memadai. Perpustakaan dapat diselenggarakan secara optimal apabila tersedia jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan yang cukup. Jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan sangat menentukan keberhasilan layanan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data statistik pustakawan pada laman Perpustakaan Nasional per Februari 2021, jumlah fungsional pustakawan yang tersebar di 34 provinsi Indonesia berjumlah 4.010 orang. Jumlah tersebut terdiri dari tenaga perpustakaan sekolah sebanyak 190 orang, perpustakaan perguruan tinggi sebanyak 1.531 orang, perpustakaan khusus sebanyak 442 orang, perpustakaan badan (tingkat provinsi) 744 orang, perpustakaan nasional sebanyak 529 orang, dan perpustakaan umum sebanyak 574 orang. Dengan jumlah kebutuhan pustakawan sebanyak 79.915 orang, maka saat ini Indonesia kekurangan 75.905 pustakawan.

Dari segi kualitas, saat ini tempat uji kompetensi untuk pustakawan adalah Dinas Perpustakaan Daerah, namun dalam pelaksanaannya tidak semua Dinas Perpustakaan mempunyai sarana dan prasarana yang sesuai dengan syarat yang ditentukan untuk terselenggaranya uji kompetensi.

Sehingga hasil pelaksanaan verifikasi tempat uji kompetensi tidak semua lokus target dapat terverifikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka harus mencari lokus baru yang sesuai dengan kriteria asesmen. Hasil pelaksanaan verifikasi tempat uji kompetensi sangat menentukan lancarnya pelaksanaan sertifikasi (Perpusnas, 2019).

Menilik Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah

Komitmen pemerintah dalam pembangunan perpustakaan untuk meningkatkan indeks literasi tertuang pada RKP tahun 2021. Pemerintah menetapkan peningkatan budaya literasi sebagai salah satu kegiatan prioritas yang mendukung capaian program prioritas peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter. Kegiatan prioritas tersebut diturunkan ke dalam 3 indikator, yaitu: (i) rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk; (ii) rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk; (iii) persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar.

Tabel 2. Perbandingan Indikator pada RKP 2021 dan Kondisi Saat Ini

Indikator	2020	Target 2021
Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	1:12	1:15
Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	1:20.000	1: 19.000
Persentase Peningkatan Perpustakaan Sesuai Standar	(Jumlah perpustakaan sesuai standar hingga tahun 2020 sebanyak 1.877 perpustakaan)	20,45 persen (2.261 perpustakaan sesuai standar)

Sumber: Berbagai sumber, diolah.

Pada tabel 2 nampak bahwa indikator-indikator kegiatan pada dokumen RKP telah selaras dengan penyelesaian beberapa tantangan pembangunan perpustakaan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Namun demikian, apabila dilihat secara lebih lanjut, dengan membandingkan target pada tahun 2021 dan capaian sejauh ini, terlihat adanya ketidaksielarasan pada indikator rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk.

Rasio kecukupan koleksi perpustakaan tahun 2020, mengacu pada bahan paparan Kepala Perpustakaan RI pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI pada 25 Januari 2021, adalah 1:12 atau satu buku untuk setiap 12 orang penduduk. Capaian tersebut sudah melebihi target RKP yang sebesar 1:15 sehingga target tersebut dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Untuk itu, pemerintah hendaknya melakukan penyesuaian terhadap target indikator tersebut.

Sementara terkait target indikator persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar sebesar 20,45 persen, atau 384 perpustakaan yang

direncanakan untuk terakreditasi pada tahun 2021, hal ini masih dinilai kurang. Dengan jumlah perpustakaan terakreditasi selama 5 tahun terakhir sebanyak 1.877 perpustakaan dan rata-rata akreditasi pertahun sebanyak 375 perpustakaan, maka untuk mengakreditasi sebanyak 154.359 perpustakaan dibutuhkan waktu selama 411 tahun.

Di samping itu, belum optimalnya pembangunan perpustakaan secara umum dalam peningkatan literasi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh terbatasnya ruang fiskal dalam mendanai berbagai program dan kegiatan perpustakaan. Rata-rata pagu anggaran Perpustakaan selama 5 tahun terakhir adalah sebesar Rp619,38 miliar. Nilai tersebut rasanya tidak sebanding dengan besarnya tantangan terkait pembangunan perpustakaan yang dihadapi saat ini. Dibutuhkan dukungan politik anggaran dan formulasi kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memberikan perhatian serius terhadap upaya pengembangan perpustakaan, dan mewujudkan masyarakat literat.

Rekomendasi

Untuk mewujudkan peningkatan budaya literasi, pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi syarat yang sangat penting. Namun, hingga saat ini masih terdapat permasalahan umum baik dari aspek ketersediaan perpustakaan, ketersediaan koleksi bahan bacaan perpustakaan, ketersediaan tenaga perpustakaan. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut: **pertama**, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan baik secara kuantitas maupun kualitas. **Kedua**, meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap rencana maupun realisasi kegiatan pemerintah terkait pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan. Upaya konkret yang dapat dilakukan terkait ketidaksielarasan antara dokumen perencanaan dan kondisi saat ini ialah dengan merevisi target indikator agar lebih relevan dengan capaian saat ini. **Ketiga**, lebih proaktif dalam melaksanakan kerjasama dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat maupun daerah dengan masyarakat. Keterbatasan fiskal merupakan hambatan bagi negara untuk mempercepat pembangunan perpustakaan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat diperlukan.

Daftar Pustaka

OECD. 2019. Programme For International Student Assessment (PISA) Results From PISA 2018.

Perpustakaan Nasional. 2018. Publikasi IFLA 147. Layanan Perpustakaan Umum Panduan IFLA/ UNESCO untuk Pengembangan Perpustakaan Edisi Revisi Kedua ISBN 978-979-008-965-5

Perpustakaan Nasional. 2021. Bahan Paparan Kepala Perpustakaan Nasional RI pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI disampaikan pada tanggal 25 Januari 2021.

Perpustakaan Nasional. 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Perpustakaan Nasional RI.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan

dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi. ISBN: 978-602-0792-15-6

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Laman <https://pustakawan.perpusnas.go.id/> diakses pada tanggal 26 Februari 2021.

Laman <https://data.perpusnas.go.id/> diakses pada tanggal 23 Februari 2021.

Dilema Defisit APBN Serta Solusi Mengatasinya

oleh
Tio Riyono*)

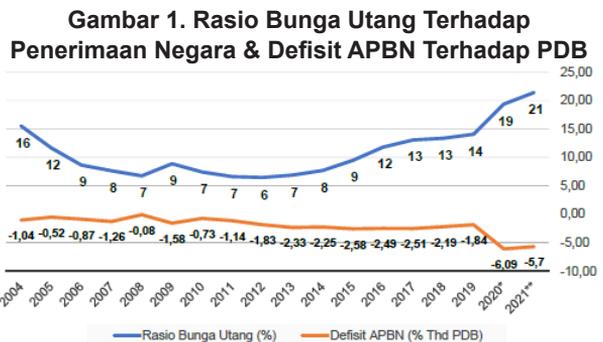
Abstrak

Pandemi Covid-19 memaksa terjadinya peningkatan defisit yang signifikan. Kebijakan defisit APBN kondisi normal terbukti tidak lagi efektif berdampak pada perekonomian Indonesia. Namun, kebijakan defisit APBN pada kondisi krisis merupakan hal yang wajar terjadi. Terlebih lagi pemerintah diberikan ruang untuk melakukan pelebaran defisit melebihi 3 persen hingga tahun 2022. Meskipun begitu, pemerintah tidak boleh terlena karena fakta menunjukkan bahwa setiap kebijakan defisit APBN selalu menimbulkan penambahan utang. Diperlukan upaya mengurangi defisit sehingga pada pasca krisis APBN bisa terselamatkan untuk pembangunan ekonomi, bukan untuk membayar utang. Beberapa alternatif kebijakan dalam mengurangi defisit APBN, antara lain efisiensi pengeluaran negara, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), serta renegosiasi utang.

Berdasarkan sejarah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sejak tahun 1984-2004 Indonesia terbukti hanya 5 kali terhindar dari defisit anggaran (Karim, 2013). Sedangkan sejak 2004 hingga kini selalu menerapkan defisit APBN. Pada kondisi pandemi Covid-19 ini, defisit meningkat signifikan. Secara nominal dan persentase, defisit anggaran lebih parah terjadi pada 2020. Dari sebelumnya sebesar -1,84 persen (2019), menjadi -6,09 persen (2020), dan target tahun 2021 sebesar -5,7 persen (2021). Kebijakan defisit APBN melalui Perpu No. 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020 telah memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan pelebaran defisit di atas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga tahun 2022.

Posisi utang pemerintah per Desember 2020 sebesar Rp6.074,56 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dengan jumlah utang tersebut, pembayaran bunga utang, baik dalam negeri maupun luar negeri, telah membebani 21 persen atas penerimaan

negara, di luar hibah. Anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang dalam APBN tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp373,26 triliun, meningkat 10,2 persen dari *outlook* APBN tahun 2020. Jumlah tersebut terdiri atas: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp355,1 triliun; dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp18,15 triliun.



Sumber: LKPP 2014-2019, diolah.

*APBN KITA Januari 2021

**Nota Keuangan APBN TA 2021

Meskipun saat ini terpaksa defisit, kebijakan APBN ke depan harus menghindari penambahan utang. Untuk itu, sejak saat krisis ini pemerintah perlu mewaspadaikan tingkat utang agar terjaga tidak berlebihan. Sehingga risiko yang akan muncul kemudian masih dapat dikelola dengan baik.

*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: tio.riyono@dpr.go.id

Langkah yang lebih praktis dalam meminimalisir defisit adalah dengan melakukan rasionalisasi pengeluaran. Namun dalam kenyataannya, mayoritas kebijakan yang ditempuh adalah defisit, sebagaimana ditunjukkan pada data di gambar 1. Langkah kedua yang dapat ditempuh ialah dengan mempengaruhi sisi penerimaan negara. Pemerintah dapat melakukan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan negara. Berikut beberapa alternatif kebijakan dalam rangka meminimalisir defisit APBN berdasarkan kajian literatur.

Pertama, efisiensi pengeluaran

negara. Efisiensi untuk meningkatkan kualitas belanja negara terbagi menjadi tiga; 1) efisiensi alokasi, 2) efisiensi teknis, 3) efisiensi ekonomi (Kemenkeu, 2021). Efisiensi alokasi mempunyai arti belanja negara harus sesuai kebutuhan, menjaga ketepatan pada sektor prioritas, dan dilakukan sesuai dengan fungsi pokok (*money follow function*) serta menekankan akurasi pengalokasian. Efisiensi teknis merujuk kepada kapasitas untuk menerapkan program-program dan melaksanakannya dengan biaya yang paling efisien. Efisiensi ekonomi menekankan pada pelaksanaan efektivitas kegiatan yang menghasilkan *output* optimal.

Dalam hal ini, pemerintah sudah berupaya melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai dampak pandemi Covid-19 pada Maret 2020. Postur APBN Tahun Anggaran (TA) 2020 direvisi sebanyak dua kali. Secara rinci, belanja pemerintah pusat naik dari Rp1.683,5 triliun menjadi Rp1.851,1 triliun (Perpres No. 54 Tahun 2020) lalu menjadi Rp1.975,2 triliun (Perpres No. 72 Tahun 2020). Untuk belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp856,9 triliun, namun turun menjadi Rp762,7 triliun (Perpres No. 54 Tahun 2020) kemudian naik lagi menjadi Rp763,9 triliun.

Meskipun melakukan efisiensi pada pos tertentu, pengeluaran negara meningkat sebagai dampak Covid-19. Namun,

terdapat pos anggaran yang menjadi perdebatan di saat Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19. Salah satunya ialah anggaran infrastruktur pada TA 2021 naik signifikan dari Rp281,1 triliun (2020) menjadi Rp417,4 triliun (2021). Padahal kondisi saat ini, kasus aktif Covid-19 pada awal 2021 ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Dapat dikatakan bahwa saat ini prioritas pemerintah bukan pada infrastruktur. Sehingga apabila anggaran belanja tersebut dipangkas tentu akan berdampak pada penurunan defisit APBN serta memberikan ruang kepada APBN untuk dialokasikan pada prioritas penanganan pandemi Covid-19.

World Bank (2020) memberikan pandangan bahwa pemerintah harus melakukan efisiensi pengeluaran negara khususnya pada belanja publik. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan realokasi lebih lanjut terhadap belanja dari program-program subsidi energi dan pupuk yang tidak efisien serta memperbaiki program bantuan tunai agar lebih tepat sasaran. Diperkirakan keduanya masing-masing akan menghemat belanja sebesar 0,7 persen dari PDB per tahun.

Kedua, pengutamaan pemanfaatan

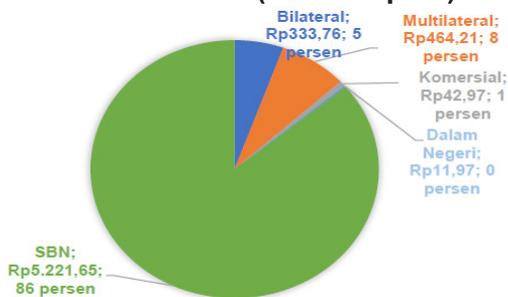
SAL. Pemerintah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan defisit APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya. Instrumen ini dapat digunakan dalam rangka mengurangi beban utang akibat kebijakan defisit APBN. Selain sebagai salah satu sumber pembiayaan, SAL juga dapat digunakan sebagai bantalan fiskal (*fiscal buffer*) untukantisipasi terhadap tingginya ketidakpastian. Penggunaan SAL secara umum juga menjadi bagian dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi ini.

Pada tahun 2020 lalu, pemerintah memutuskan untuk tidak menggunakan SAL yang diperkirakan sebesar Rp70,64 triliun. Hal tersebut dikarenakan posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terbilang sangat besar mencapai Rp234,65 triliun.

Pada APBN TA 2021, pemerintah berencana melakukan penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp2,7 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp51,4 triliun sehingga total pinjaman baru sebesar Rp54,1 triliun. Jumlah tersebut dapat ditutupi target SAL 2020 atau SiLPA 2020 yang jumlahnya jauh di atas angka tersebut. Sehingga, APBN tidak terbebani dengan pembayaran bunga baru. Dalam kondisi pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan pemanfaatan instrumen lain daripada pinjaman untuk menutupi defisit APBN. Terlebih lagi SiLPA 2020 jumlahnya yang sangat besar dapat membantu APBN di tengah pandemi Covid-19.

Ketiga, renegotiasi utang. Pada gambar 1, telah ditunjukkan bahwa pembayaran bunga utang membebani sekitar seperlima penerimaan negara. Data dari tahun 2004 menunjukkan tren meningkat. Peningkatan signifikan terjadi pada 2020 dari 14 persen (2019) menjadi 19 persen (2020). Pada APBN TA 2021 diperkirakan juga meningkat menjadi 21 persen.

Gambar 2. Komposisi Utang Pemerintah per Desember 2020 (triliun rupiah)



Sumber: APBN Kita Januari 2021, diolah.

Kebijakan renegotiasi utang bisa menjadi salah satu yang bisa diupayakan pemerintah mengingat

sekitar 13,14 persen utang berasal dari pinjaman luar negeri bilateral dan multilateral serta kondisi negara yang sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Pada 2001, pemerintah pernah melakukan negosiasi utang yang besar dalam sejarah. Pertama, ketika Indonesia berhasil melakukan negosiasi utang Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada swasta sebesar USD85 miliar. Hasilnya, beban utang PLN berhasil dinegosiasi USD50 miliar sehingga tersisa USD35 miliar. Tak sampai di situ, pemerintah Indonesia juga pernah melakukan negosiasi terhadap utang luar negeri Jerman. Pemerintah Indonesia berhasil mengurangi utang sebesar USD600 juta. Sebagai balasannya, Indonesia hanya perlu menyediakan lahan untuk konservasi di Kalimantan seluas 300 ribu Ha (Republika, 2020).

Indonesia dengan caranya sendiri, harus mampu memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 untuk melakukan negosiasi utang luar negeri, baik utang bilateral maupun multilateral. Terlebih lagi, Indonesia menjalin hubungan baik dengan organisasi multilateral.

Daftar Pustaka

APBN KITA (2021). APBN KITA (Kinerja dan Fakta) 2020. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diunduh dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita-januari-2021.pdf>

Bello, W. (2010). DEFY THE CREDITORS AND GET AWAY WITH IT. Diakses pada 22 Februari 2021, melalui https://fpif.org/defy_the_creditors_and_get_away_with_it/

Handra, H., & Kurniawan, B. (2020). Long-run Relationship between Government Debt and Growth the Case of Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issues. diakses dari <https://search.proquest.com/openview/023dba979c0545d7cfb4a80273cc2cea/1?pq-origsite=gscholar&cbl=816338>

Rekomendasi

Defisit APBN Indonesia di tengah krisis memang tidak dapat dihindari. Tidak hanya di Indonesia, pandemi Covid-19 telah mengancam seluruh negara di dunia. Pembahasan mengenai solusi mengatasi defisit APBN dalam konteks menyelamatkan APBN pasca krisis sangat diperlukan guna memberikan rambu-rambu di tengah membengkaknya defisit APBN. Telah dijelaskan di atas bahwa terdapat beberapa solusi yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi defisit APBN. Defisit APBN yang diciptakan selalu ditutupi dengan penambahan utang, baik berasal dari pinjaman luar negeri maupun dalam negeri. Akibatnya sampai saat ini APBN Indonesia terbebani sekitar seperlima dari penerimaan dipergunakan untuk membayar bunga. Pemerintah sebaiknya dengan segera menyusun langkah strategis solusi yang telah dijelaskan di atas antara lain: 1) Melakukan efisiensi pengeluaran, 2) Pengutamaan pemanfaatan SAL, 3) serta melakukan renegotiasi utang. Khusus untuk renegotiasi, pemerintah harus bisa memanfaatkan kesempatan di tengah pandemi Covid-19. Diharapkan ke depan, APBN Indonesia dapat lebih optimal dalam memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karim, A. A. (2013). *Ekonomi Makro Islami*. PT RajaGrafindo Persada.

Kemenkeu. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2004-2019. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kemenkeu. (2021). *Sekilas Tentang Analisis Kebijakan Belanja Publik/ Negara*. Kementerian Keuangan RI. Diakses dari <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/42f818c1-8b0a-4731-8dea-cddcd6a6dc13>

Nota Keuangan APBN TA 2021. (2020). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diunduh dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/16834/buku-ii-nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2021.pdf>

Pattillo, Catherine dkk. (2002). *External Debt and Growth*. Finance and development. A quarterly magazine of the IMF. June 2002, Volume 39, Number 2

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Republika (2020). *Utang Nyaris Tembus Rp 6.000 Triliun, Ini Saran Rizal Ramli*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/qdn4di440/utang-nyaris-tembus-rp-6-000-triliun-ini-kata-rizal-ramli>

Saniya, M. (2017). *Perubahan Kebijakan Argentina Dalam Sengketa Kepulauan Malvinas: Periode Kepemimpinan Nestor Kirchner Tahun 2003* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). Diunduh dari http://repository.unair.ac.id/69790/3/JURNAL_Fis.HI.25_18_San_p.pdf

Sindonews. (2020). *Pemerintah Diingatkan Jangan Andalkan Utang Luar Negeri*. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/79350/12/pemerintah-diingatkan-jangan-andalkan-utang-luar-negeri-1592921169>

World Bank. (2021). *International Debt Statistics*. Diunduh dari <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34588/9781464816109.pdf>

World Bank. (2020). *Belanja Untuk Hasil yang Lebih Baik*. Diunduh dari: <https://www.worldbank.org/idper>

Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar: Kebijakan *Refocusing* Anggaran untuk Prioritas Nasional

oleh

Dwi Resti Pratiwi*)

Hikmatul Fitri**)

Abstrak

Infrastruktur diyakini memiliki peranan positif bagi pertumbuhan ekonomi serta menjadi kunci penting dalam transformasi ekonomi nasional. Pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dari tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Namun di tengah pandemi dan upaya pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur secara umum harus mengalami penyesuaian dan refocusing anggaran. Meskipun demikian, infrastruktur pelayanan dasar masih ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 karena memiliki daya dukung bagi pemulihan ekonomi nasional melalui Program Padat Karya Tunai (PKT).

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat seperti bendungan dan irigasi, akses rumah layak serta infrastruktur pemukiman masih menjadi tantangan bagi Pemerintah. Hal ini dikarenakan hingga tahun 2019, kapasitas layanan infrastruktur penyedia air baku yang aman dan layak hanya mencakup 30 persen dari total kebutuhan air baku nasional. Sementara itu, pasokan air irigasi dari bendungan baru mencapai 12,3 persen dari keseluruhan luas daerah irigasi. Selanjutnya, masih terdapat 45,90 persen rumah tangga di Indonesia yang menempati hunian tidak layak (LAKIP Kementerian PUPR, 2019). Selama periode pembangunan 2015-2019, pemerintah baru berhasil membangun infrastruktur pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) berupa 61 bendungan dari target 65 bendungan, pembangunan air baku baru mencapai 30,70 m³/dtk dari target 67,52 m³/dtk. Pada sektor rumah dan permukiman, hingga tahun 2019 pembangunan infrastruktur layanan dasar akses air minum layak baru mencapai 21.563 m³/dtk dari target 26.928 m³/dtk, akses sanitasi layak sebanyak 9,9 juta Kepala Keluarga (KK) dari target 10,8 juta KK, dan penanganan kawasan permukiman kumuh seluas

32,2 ribu Ha dari target 38,4 ribu Ha. Pembangunan rumah susun bagi masyarakat miskin baru mencapai 48,8 ribu unit dari target 550 ribu unit, pembangunan rumah khusus sebesar 23,9 ribu dari target 50 ribu unit (tabel 1). Kendala yang masih dihadapi dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar adalah permasalahan dalam penyediaan lahan serta keterlambatan penyediaan alokasi dana untuk pembebasan lahan. Kendala lain yang dihadapi pada pemenuhan akses air minum layak yaitu terbatasnya alokasi anggaran untuk pencapaian akses 100 persen air minum dan keterlambatan pekerjaan di lapangan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar 2015-2019

Target Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	Satuan	2014-2019	
		Target	Realisasi
Sektor Sumber Daya Air			
Pembangunan Bendungan	bendungan	65	61
Pembangunan Air Baku	m ³ /dtk	67,52	30,7
Pembangunan Jaringan Irigasi	Ha	1.000.000	1.005.402
Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Ha	3.000.000	3.021.105
Sektor Cipta Karya			
Peningkatan Akses Air Minum Layak	Liter/dtk	26.928	21.563
Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	38.431	32.225
Peningkatan Akses Sanitasi Layak	KK	107.377.054	9.886.371
Sektor Perumahan Rakyat			
Pembangunan Rumah Khusus	Unit	550.000	48.792
Pembangunan Rumah Umum	Unit	50.000	23.960

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PUPR 2015-2019, diolah.

*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: dwi.pratiwi@dpr.go.id

**) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: hikmatulfitri.elewa@gmail.com

Mengingat pentingnya sarana dan prasarana infrastruktur layanan dasar bagi kebutuhan dasar manusia serta menunjang produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat seperti peningkatan produksi pertanian khususnya produk pangan, aksesibilitas air layak dan sanitasi, maka pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di masa pemulihan ekonomi. Tulisan ini akan membahas secara singkat pembangunan infrastruktur pelayanan dasar sebagai prioritas nasional 2021 di tengah penyesuaian akibat pandemi, yaitu kebijakan *refocusing* anggaran.

Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur di Masa Pemulihan Ekonomi

Menurunnya aktivitas ekonomi selama masa pandemi Covid-19 ikut memengaruhi pembangunan fisik seperti infrastruktur, sehingga tertundanya manfaat ekonomi atas keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur. Hal tersebut juga diikuti oleh menurunnya kontribusi sektor konstruksi terhadap perekonomian nasional. Data BPS 2021 menunjukkan kontribusi sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun cukup signifikan pada kuartal IV-2020 yaitu terkontraksi sebesar 6,67 persen secara tahunan (yoy) atau 3,72 persen secara kumulatif.

Dalam kondisi resesi, pembangunan infrastruktur dapat menggerakkan ekonomi jangka pendek dari sisi *demand* melalui penciptaan lapangan kerja, menggerakkan sektor konstruksi, mendorong sektor informal, serta peningkatan konsumsi. Sektor konstruksi juga dapat memberikan efek berganda pada rantai pasok sektor tersebut, seperti permintaan berbagai macam material bangunan dan alat berat. Sementara dalam jangka panjang infrastruktur dapat mendorong *supply* melalui peningkatan kapasitas produksi serta perbaikan arus barang dan jasa, sehingga tercipta efisiensi ekonomi (Ja'far, 2007 dalam Prapti, dkk. 2015). Proyek infrastruktur

dinilai memiliki daya ungkit dalam memacu pertumbuhan ekonomi, laporan *World Bank* tahun 1994 menjelaskan bahwa peningkatan stok infrastruktur sebesar 1 persen akan berdampak pada peningkatan PDB sebesar 1 persen (Renstra Kementerian PUPR 2020-2024). Selain itu, pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat seperti infrastruktur dasar dengan program padat karya di pedesaan akan meningkatkan daya beli masyarakat (pu.go.id). Oleh karenanya, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur di masa pemulihan ekonomi dan menetapkan sebagai salah satu Prioritas Nasional (PN) kelima dalam RKP tahun 2021, yaitu “memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar”.

Kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2021 utamanya diarahkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, salah satunya dengan meningkatkan alokasi Program PKT pada infrastruktur penyediaan kebutuhan dasar untuk peningkatan kesehatan dan lingkungan masyarakat serta ketahanan pangan (Kementerian PUPR, 2021). Melalui APBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp414 triliun atau meningkat 47,28 persen dari tahun 2020 yang sebesar Rp281,1 triliun. Namun, anggaran infrastruktur merupakan salah satu alokasi anggaran yang harus mengalami *refocusing/realokasi* untuk mendukung pengendalian pandemi Covid-19 sesuai Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor S-30/MK02/2021. Kementerian PUPR, salah satu Kementerian/ Lembaga (K/L) yang melaksanakan fungsi pelayanan infrastruktur dasar yang mengalami *refocusing* anggaran tahun 2021 sebesar Rp3,08 triliun atau turun sebesar 63,76 persen dari angka *refocusing* 2020 yang sebesar Rp8,5 triliun. Dari pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp149,81 triliun, 12,11 persennya dialokasikan untuk program PKT atau sebesar Rp18,14 triliun.

Pada tahun 2021, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur layanan dasar sebagai prioritas nasional dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dengan target terbangunnya rumah susun dan rumah khusus 10.706 unit, bendungan 53 unit (43 *on going* dan 10 baru), serta pembangunan 600 km dan rehabilitasi 3.900 km jaringan irigasi. Infrastruktur dasar seperti bendungan dan irigasi memberi manfaat dalam mendukung sektor ketahanan pangan, di mana sektor tersebut menjadi salah satu tumpuan upaya pemulihan ekonomi. Namun di tengah *refocusing* anggaran, hal ini menjadi tantangan bagi Kementerian PUPR sebagai K/L yang menjalankan fungsi pelayanan infrastruktur. Pasalnya untuk mencapai target pembangunan infrastruktur layanan dasar, indikasi kebutuhan pendanaan pada tahun 2021 masing-masing sebesar Rp38,94 triliun untuk program perumahan dan kawasan permukiman dan Rp85,39 triliun untuk program ketahanan sumber daya air (Renstra Kementerian PUPR 2020-2024). Sementara alokasi dana yang tersedia untuk melaksanakan program prioritas tersebut pada masing-masing unit organisasi adalah sebesar Rp25,48 triliun (Ditjen Cipta Karya); Rp5,7 triliun (Ditjen Perumahan); dan Rp25,85 triliun (Ditjen SDA). Terdapat *gap* yang besar bagi kebutuhan pendanaan program prioritas dalam pembangunan infrastruktur layanan dasar sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Prioritas Nasional 5 dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021 (miliar rupiah)

Keterangan	Ditjen SDA	Ditjen Perumahan	Ditjen Cipta Karya
	Program Ketahanan Sumber Daya Air	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Alokasi Anggaran PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	25.849,72	5.740,54	25.478.720,05
Indikasi Kebutuhan Pendanaan	85.388,96	38.938,10	38.938,10
% Gap Kebutuhan Pendanaan	69,73	85,26	34,57

Sumber: Kementerian PUPR, diolah.

Besarnya *gap* kebutuhan pendanaan dibandingkan alokasi dana yang tersedia akan menimbulkan potensi sulit terealisasinya program prioritas di tahun 2021. Hal ini disebabkan terhambatnya pencapaian program ketahanan pengelolaan sumber daya air. Tertundanya penyelesaian bendungan dan irigasi akan menghadapi permasalahan ancaman kelangkaan air seperti penyediaan air irigasi untuk kegiatan pertanian (BPIW, 2021). Pada akhirnya, hal tersebut ikut memengaruhi sektor ketahanan pangan, di mana sektor tersebut menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi. Produksi pangan dan pertanian pada umumnya multak membutuhkan suplai air irigasi. Imam Mustofa, Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional menjelaskan bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan air pada produksi pangan dan pertanian akan memberikan dampak ekonomi turunan seperti kondisi *agricultural drought* atau kekeringan pertanian (Liputan6.com, 2020). Sementara itu, tertundanya pemenuhan kebutuhan pada program perumahan dan kawasan permukiman akan dihadapkan dengan beberapa potensi risiko. Rumah tangga yang tinggal di hunian tidak layak dengan layanan infrastruktur dasar (termasuk sanitasi air dan air minum) akan semakin meningkat. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 menunjukkan 45,1 persen rumah tangga masih menempati rumah tidak layak. Arus urbanisasi yang semakin meningkat (saat ini mencapai 4,1 persen) yang tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal berpotensi meningkatkan wilayah permukiman kumuh/padat penduduk. Hal ini memengaruhi pola hidup sehat masyarakat dan kesehatan lingkungan, sehingga dibutuhkan infrastruktur yang memadai (Renstra PUPR 2020-2024).

Daftar Pustaka

BPS. 2021. Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020. BPS: Jakarta

Rekomendasi

Pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Walaupun tengah menghadapi pandemi, infrastruktur tetap diperlukan untuk mengakselerasi pertumbuhan meskipun sedikit mengalami penyesuaian yaitu pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung pemulihan ekonomi. Dengan penetapan sektor prioritas tersebut diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi, Pemerintah dapat mempertimbangkan *refocusing* anggaran yang diikuti *refocusing* target pembangunan sehingga outputnya lebih ditujukan pada pemberdayaan masyarakat seperti Program PKT tersebut. Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan nasional dapat didorong melalui strategi investasi oleh badan usaha seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) maupun sumber pembiayaan kreatif lainnya serta dapat mengembangkan metode atau aplikasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan proyek infrastruktur.

Dirjen Cipta Karya. 2021. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2021

Dirjen Perumahan. 2021. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perumahan 2021

Dirjen Sumber Daya Air. 2021. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2021

Kementerian PUPR. 2021. Enam Program Prioritas Kementerian PUPR Tahun 2021 untuk Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional, diakses dari <https://pu.go.id/berita/enam-program-prioritas-kementerian-pupr-tahun-2021-untuk-percepat-pemulihan-ekonomi-nasional>

Kementerian PUPR. 2020. Laporan Kinerja Kementerian PUPR 2015-2019

Kementerian Keuangan. 2020. Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021

Kementerian PUPR. 2021, Pagu Anggaran Kementerian PUPR 2021 Sebesar RP149,81 Triliun, Alokasi Program Padat Karya Meningkatkan Untuk Dukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, diakses dari <https://pu.go.id/berita/pagu-anggaran-kementerian-pupr-2021-sebesar-rp-149-81-triliun-alokasi-program-padat-karya-meningkat-untuk-dukung-program-pemulihan-ekonomi-nasional>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2021

Katadata.co.id. 2020. Putar Haluan Memacu Daya Beli dan Ekonomi: dari Bansos ke Infrastuktur, diakses dari <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f7b1f908bf49/putar-haluan-memacu-daya-beli-ekonomi-dari-bansos-ke-infrastruktur>

Prapti, Lulus Rr, dkk., 2015. "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Kota Semarang". Jurnal Dinamika Sosbud Vol.17 No. 2 Juni 2015:82-103

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR. 2021. Rakorbangwil Bidang PUPR Bahas Kebijakan dan Program Ketahanan Sumber Daya Air, diakses dari <https://bpiw.pu.go.id/article/detail/rakorbangwil-bidang-pupr-bahas-kebijakan-dan-program-ketahanan-sumber-daya-air>

Kementerian PUPR. 2020. Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024

Liputan6.com. 2020. Tantangan Penyediaan Air Irigasi dan Mobilitas Sumber Daya Pertanian, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4271948/tantangan-penyediaan-air-irigasi-dan-mobilitas-sumber-daya-pertanian>

*“Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional”*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
Twitter: @puskajianggaran
Instagram: puskajianggaran



9 772502 868006